



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS

(PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT)

TAHUN 2009-2010 DI KABUPATEN GROBOGAN

Barkah Welli Sanjaya¹, Yuwanto, Ph.D², Dra. Puji Astuti, M.Si³

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Program PAMSIMAS merupakan program pemerintah pusat yang membantu penyediaan air minum dan sanitasi dengan konsep berbasis kebutuhan masyarakat bagi kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memiliki kesulitan didalam pemenuhan akses air dan sanitasi. Salah satu kabupaten yang telah melaksanakan Program PAMSIMAS Tahun 2008 adalah Kabupaten Grobogan. Akan tetapi, dari pemberitaan surat kabar Tahun 2011 menyatakan bahwa Program PAMSIMAS gagal terlaksana untuk membantu masyarakat dalam akses air dan sanitasi, bahkan dikatakan banyak yang *mangkrak* (tidak terawat). Padahal menurut pemerintah kabupaten dan konsultan PAMSIMAS, bahwa desa-desa penerima Program PAMSIMAS telah berhasil, bahkan ada yang mendapatkan HID.

Tipe penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dengan lokasi penelitian di Desa Jetaksari, Kenteng, Ngrandah dan Pakis sebagai desa penerima Program PAMSIMAS untuk menggambarkan mengapa terjadi variasi pencapaian tujuan Program PAMSIMAS, yakni berhasil dan gagal. Selain itu, juga menggambarkan dalam analisisnya bagaimana proses pelaksanaan PAMSIMAS?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah pada proses pelaksanaan PAMSIMAS yakni pada komponen pendukung keberhasilan Program PAMSIMAS seperti perencanaan (komponen I: Keterlibatan Masyarakat), pembangunan (komponen II: Pelayanan sanitasi dan kesehatan masyarakat), dan pengelolaannya (komponen III: penyediaan sarana air minum dan sanitasi).

Proses perencanaan (komponen I), tidak selamanya berbasis masyarakat didalam perencanaan program, karena yang terlibat adalah perwakilan masyarakat dan pemerintah desa dan hasil perencanaan tidak di sampaikan kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat dari keempat desa hanya mengetahui perencanaan program dari komponen kontribusi biaya (*in-cash*) dan tenaga (*in-kind*) untuk pembangunan Program PAMSIMAS, tanpa mengerti tentang rincian pembangunan tersebut. Disisi lain, Desa Jetaksari memiliki masalah pada pembangunan

¹ Barkah Welli Sanjaya adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang.

Alamat email : sanjaya_barkah@yahoo.com

² Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

³ Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

(komponen II) yang berdampak pada pelaksanaan pengelolaan (komponen III), yakni masalah pada proses penentuan sumber air yang tidak melalui uji kelayakan dan kesehatan sehingga air yang dihasilkan tidak layak konsumsi oleh masyarakat, yang pada akhirnya membuat sarana tidak pernah dipakai serta tidak terawat oleh masyarakat. Desa Kenteng, Ngrandah dan Pakis memiliki masalah pada upaya penambahan jumlah sumur (komponen III) untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih, meskipun telah dilakukan pengembangan akses sarana air. Namun penggunaan air dari ketiga desa tersebut tidak efektif, karena masyarakat lebih memilih menggunakan sarana air pribadi daripada sumur PAMSIMAS ketika musim penghujan, sedangkan penggunaan sarana PAMSIMAS hanya ketika musim kemarau. Padahal, Program PAMSIMAS mengharapkan adanya keberlanjutan penggunaan untuk membantu pemasukan biaya untuk pengelolaan sarana air.

Sedangkan dari sisi kegiatan pengelolaan sanitasi, hanya Desa Kenteng yang memiliki kegiatan rutin untuk melaksanakan pemantauan tingkat kesadaran sanitasi dan PHBS masyarakat, sedangkan Desa Jetaksari, Ngrandah dan Desa Pakis memiliki masalah masalah koordinasi dan bantuan serta pemahaman mengenai konsep “relawan” (sukarela) antar anggota kader sanitasi maupun pemerintah. Sehingga membuat pelaksanaan kegiatan pemantauan sanitasi dan PHBS masyarakat terkendala, meskipun memiliki potensi untuk dilanjutkan kembali.

Kata kunci: Program PAMSIMAS, proses, keterlibatan masyarakat

Abstract

Programme of PAMSIMAS is a national government Programme that helps water supply and sanitation with the concept of community-based that exist in the counties and cities throughout Indonesia which have a lack of water supply and sanitation. One of its Programme has been implemented since 2008 is Grobogan Regency. When it come to 2011, there is some kind of headline news by one of the mass media that inform implementation of PAMSIMAS in Grobogan Regency has many failures to supply water and sanitation for their people, even low of maintenance. In other side, regional government dan Consultan of PAMSIMAS said that there's succes of implemented PAMSIMAS in Grobogan Regency by the villages whom received Programme of PAMSIMAS.

The type of this research is descriptive analysis, with case studies on the village which received Programme PAMSIMAS namely Jetaksari, Kenteng, Ngrandah, and Pakis village to describe: why there's varied (succes and failed) of reacing the purpose of PAMSIMAS? and also try to describe an analysis how the process of implementing PAMSIMAS?

The results of this research showed that the Programme PAMSIMAS has several problems in implementing of programme of PAMSIMAS by the phase or the component, it is planning (component I: empowerment community based), building (component II: health and sanitation service), and maintenance/management (component III: water and sanitation facilities).

In the process of planning on component I, is not usually involve the community based to planning the Programme of PAMSIMAS, because is not all of community involve in the programme and just the represent of the community, but they don't deliver the result of planning to all community. So, the community just known of planning is all about giving contribution in-cash and in-kind to build/executed the planning. In other side, village Jetaksari has problem to build the programme water supply and have cain reaction to the maintenance of the programee

that is decision to get water resources for water supply which the water never meet with the standart of good water and doesn't meet with quality of health. In that case the community never use the water, and cause "abandon" the facilities of water supply by the community. Village of Kenteng, Ngrandah, and Pakis have several problems in the area of scalling-up or development the water supply for community by increasing the number of wells. In part of maintenance the program (component III), those three village have inefficent to water supply, because the community prefer use their wells than PAMSIMAS water facilities in the rainy season, and just use it for water needs in the summer season (seasonal use). In fact, programme PAMSIMAS need to continuously uses to help income for operational dan maintenance the facilities, that can help community to water supply.

In other side of activity management sanitation, village of Kenteng has routinely monitoring awareness sanitation and hygiene to the community every month on the 20th. The rest of village namely Jetaksari, Ngrandah and Pakis have a lack of coordination and help between Village Midwife (Bidan) with Sanitation Cadres (selected community) to monitoring awareness sanitation and hygiene to the community and basis school.

Keywords: Programme PAMSIMAS, Process, Community involvement

A. Pendahuluan

Pentingnya perumusan sebuah kebijakan yang menangani ketersediaan air bersih dan kesehatan sanitasi bagi masyarakat di desa maupun pinggiran kota, serta sebagai upaya untuk mencapai target pembangunan Millenium sektor Air Minum dan Sanitasi di tahun 2015. Maka pada Tahun 2007, pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan nasional untuk menyediakan air bersih dan sanitasi bagi kabupaten kota di Indonesia dengan nama "Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan yang Berbasis Masyarakat" (PAMSIMAS).

Kabupaten Grobogan telah memulai pelaksanaan program tersebut sejak Tahun 2008 hingga saat ini. Namun ketika terdapat publikasi dari media massa (Kedaulatan Rakyat Jogja) di Tahun 2011, yang menyatakan bahwa Program PAMSIMAS di Desa Rejosari Kecamatan Kradenan dan desa-desa lain yang menerima PAMSIMAS bermasalah pada penyediaan air minum dan sanitasi yang menyebabkan tidak terawatnya Program PAMSIMAS untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Letak permasalahannya adalah dari buruknya pengelolaan sarana air PAMSIMAS, sehingga setelah enam bulan peresmianya sudah tidak mampu membantu masyarakat. Namun disisi lain, pemerintah Kabupaten Grobogan dan Konsultan PAMSIMAS desa penerima PAMSIMAS ada yang berhasil, bahkan ada yang mendapatkan HID PAMSIMAS di Tahun 2010-2012.

Sehingga perumusan masalah yang dapat menjadi bahan penelitian adalah :

- a. Bagaimana proses pelaksanaan Program PAMSIMAS?
- b. Mengapa terjadi hal yang tidak merata/bervariasi dalam pencapaian hasil pelaksanaan Program PAMSIMAS?

B. Kajian Teori

Evaluasi pada Program PAMSIMAS dalam penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai rumusan masalah mengenai proses pelaksanaan Program PAMSIMAS dan

menjelaskan mengapa terjadi hal yang tidak merata/bervariasi dalam pencapaian hasil pelaksanaan Program PAMSIMAS.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka digunakan tipe evaluasi kebijakan dari sudut pandang efektivitas, yang menilai “apakah tujuan dari kebijakan Penyediaan Air dan Sanitasi, bisa tercapai melalui Program PAMSIMAS PAMSIMAS”. Sedangkan evaluasi programnya menggunakan Tipe Evaluasi Proses yang menganalisis bagaimana proses untuk mencapai tujuan akhir Program PAMSIMAS dengan tiga komponen programnya, yakni : (1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; (2) peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan pelayanan sanitasi; (3) penyediaan sarana air minum dan sanitasi. Sehingga analisisnya, apakah dari ketiga komponen tersebut telah terpenuhi untuk mencapai tujuan akhir Program PAMSIMAS.

C. Metode Penelitian

Penelitian evaluasi membutuhkan rincian yang kompleks untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat. Sehingga perlu pembahasan lebih dalam mengenai objek dari perumusan masalah, yakni tentang perkembangan Program PAMSIMAS. Sehingga tipe penelitian yang sesuai adalah kualitatif.

Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian untuk mengungkapkan masalah yang spesifik pada evaluasi Program PAMSIMAS untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi; serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat. Fokus penelitian adalah mengungkap faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan Program PAMSIMAS. Sehingga lebih menitik beratkan pada desa yang berhasil dan gagal dalam mencapai tujuan PAMSIMAS. dari hasil observasi sementara didapat data bahwa Desa PAMSIMAS yang berhasil adalah Desa Kenteng, dan Pakis. Sedangkan Desa PAMSIMAS yang gagal adalah Desa Jetaksari dan Desa Ngrandah. Adanya fokus penelitian yang mengambil data desa yang berhasil dan gagal dalam pelaksanaan PAMSIMAS dikarenakan adanya model “situasi sosial”, menurut Menurut Sugiyono (2009:216) ketika penelitian berangkat dari situasi sosial, hasil kajiannya tidak diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari dalam penelitian. Dalam hal ini jika sebuah desa PAMSIMAS yang memiliki kesamaan kondisi, apakah gagal maupun berhasil maka analisis keberhasilan dan kegagalannya dapat dilihat dari hasil penelitian ini yakni tentang evaluasi program PAMSIMAS untuk melihat faktor penyebabnya. Sehingga memudahkan untuk melakukan kajian, jika ditemukan hal yang serupa dengan kondisi desa yang berhasil atau gagal dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS.

D. Hasil Penelitian

Kerangka analisis untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yang terdapat pada konsep penelitian yakni; *Pertama*, evaluasi kebijakan dari sudut pandang efektivitas, yang menilai “apakah tujuan dari kebijakan Penyediaan Air dan Sanitasi, bisa tercapai melalui Program PAMSIMASPAMSIMAS?”.

Kedua, menganalisis bagaimana proses untuk mencapai tujuan akhir Program PAMSIMAS, dengan penjelasan kondisi sekarang dan prosesnya ketika perencanaan hingga pelaksanaan program, melalui analisis tiga komponen Program PAMSIMAS yakni :

- (1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal;
- (2) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan pelayanan sanitasi;
- (3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi.

Dari kerangka analisis pertama, bahwa hasil efektivitas pencapaian tujuan penyediaan air minum dan sanitasi melalui Program PAMSIMAS berada pada hasil tidak memuaskan untuk menyediakan kebutuhan tersebut bagi masyarakat, karena secara efektivitas dari segi penyediaan air, hanya digunakan oleh masyarakat ketika musim pemenuhan kebutuhan air yakni ketika musim kemarau, sedangkan ketika musim penghujan tidak ada masyarakat yang menggunakan sarana air dari PAMSIMAS karena telah tercukupi dari sumur pribadi oleh masyarakat. Hal tersebut tentu tidak efektif bagi konsep penyediaan dan pengelolaan air secara berkelanjutan Program PAMSIMAS, bahkan beberapa desa penerima program tersebut mengalami kendala dalam pencapaian penyediaan air bagi masyarakat baik di musim kemarau dan musim penghujan. Sehingga menimbulkan asumsi, bahwa terdapat kesalahan didalam pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga pengelolaan Program PAMSIMAS.

Pencapaian Komponen I: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan

Kerangka analisis kedua, menjelaskan asumsi pada kerangka analisis pertama. Dari hasil yang didapatkan dari keempat desa tersebut, bahwa dari segi pemenuhan pada komponen I perencanaan memiliki masalah pada keterlibatan masyarakat yakni masyarakat hanya mengetahui proses perencanaan hanya dihimbau untuk kontribusi biaya (*in-cash*) dan tenaga (*in-kind*), sedangkan konsep perencanaan yang secara luas hanya diketahui oleh beberapa perwakilan masyarakat dan dari unsur pemerintahan desa, serta tidak dilakukannya pemberitahuan/penyampaian proses informasi kepada masyarakat atas hasil perencanaan. Sehingga hal ini yang membuat tidak semua masyarakat dapat mengetahui dan menjelaskan proses perencanaan pembangunan Program PAMSIMAS. Meskipun pada akhirnya menghasilkan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi) pada kondisi akses sarana air bersih dan sanitasi masyarakat. Namun didalam IMAS terdapat “keanehan” dimana dari segi analisis kondisi penggunaan air masyarakat, tertulis bahwa penggunaan air masyarakat sangat terpenuhi di musim penghujan dan kekurangan di musim kemarau. akan tetapi dari analisis tersebut, keempat desa tetap mendapatkan Program PAMSIMAS, padahal Program PAMSIMAS sendiri mengharapkan adanya pengelolaan dan penggunaan secara berkelanjutan terhadap sarana air, supaya sarana air PAMSIMAS bermanfaat bagi masyarakat serta memiliki keberlanjutan operasional. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan air dari sarana PAMSIMAS hanya efektif ketika musim kemarau.

Sedangkan kondisi pada pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Program PAMSIMAS berasal dari konsep dari perencanaan yang telah disusun baik meliputi pelaksanaan pembangunan air dan sanitasi dan bagaimana pengelolaannya. Meskipun perencanaan memuat dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan, namun pada kenyataan (realitanya) sangat berbeda dari perencanaan yang telah disusun, mengenai pada pencapaian tujuan akhir Program PAMSIMAS pada dampak dan perubahan masyarakat.

Dari proses penentuan sumber untuk sarana air bersih, masyarakat yang terlibat sebagai LKM mengeluhkan upaya penentuan sumber air yang diberikan jangka waktu yang relatif singkat, padahal menurut mereka untuk mendapatkan sumber air yang layak memerlukan waktu. Sehingga ketika penentuan sumber terbatas oleh waktu, maka hasilnya tidak maksimal untuk menyediakan air bagi masyarakat. Adapun proses pelaksanaan dan pengelolaan dari masing-masing desa tersebut yaitu:

a. Desa Jetaksari

Unit kerja teknis sarana air PAMSIMAS Desa Jetaksari, didalam pengelolaannya tidak berhasil karena terjadi kesalahan didalam proses pembangunan sarana air PAMSIMAS yakni kesalahan pada penetapan sumber air program yang tidak dilakukan dengan uji kelayakan dan kesehatan sehingga membuat kualitas air yang dihasilkan tidak sesuai kualitas konsumsi (air berwarna keruh dan terasa asin). Penetapan sumber air yang dirasakan tidak melibatkan masyarakat, serta terbatas oleh pelaksanaan jangka waktu penyelesaian membuat terganggunya pencapaian penyediaan air minum. Bahkan untuk perluasan jaringan akses air masyarakat tidak terlaksana hingga saat ini. Kondisi pada pelaksanaan dan pengelolaan air, berdampak pada kondisi kelembagaan air PAMSIMAS Desa Jetaksari, dimana hanya LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang tersisa saat ini, dari sebelumnya terdiri dari BPS (Unit Kerja Air Minum)

b. Desa Kenteng

Unit kerja teknis sarana air PAMSIMAS Desa Kenteng telah melaksanakan operasional dan pengelolaan program untuk melayani kebutuhan masyarakat. Meskipun sarana untuk distribusi/pelayanan air masyarakat tidak menggunakan meteran, namun menggunakan keran umum yang disambung dengan jalur perpipaan untuk dialirkan ke sumur-sumur masyarakat. pengelolaan biaya, berasal dari penggunaan air oleh masyarakat yang dihitung dari banyaknya air yang memenuhi sumur masyarakat, dengan ukuran/hitungan seperti ukuran sumur dengan tinggi sekitar 1 meter dikenakan tarif Rp 8000,- sedangkan ukuran sumur yang 80 cm dikenakan tarif sebesar Rp 6.000,-. Meskipun dengan pengelolaan air tanpa menggunakan materan, pada Tahun 2010 Desa Kenteng mendapatkan HID karena jangkauan pengelolaan dan pelayanan yang baik. Akan tetapi, kondisi saat ini memiliki masalah pada jangkauan pelayanan air kepada masyarakat, dikarenakan debit air dari sumur PAMSIMAS yang menurun akibat musim kemarau dan dikarenakan sejumlah sarana seperti pompa dan peralon yang hilang.

c. Desa Ngrandah

Unit Kerja Teknis Sarana Air PAMSIMAS Desa Ngrandah, memiliki kondisi yang serupa dengan PAMSIMAS Desa Kenteng, yakni telah melaksanakan operasional dan pengelolaan program untuk melayani kebutuhan masyarakat, serta melakukan sejumlah pengembangan akses sarana air, baik penambahan sejumlah sumur air dan jalur perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Dusun Ngrandah. Namun upaya peningkatan akses air masyarakat menggunakan uang pribadi dari BPS dan bukan dari penggunaan sarana air PAMSIMAS, sehingga status sumur/sarana air yang telah dikembangkan adalah milik pribadi, meskipun tetap digunakan untuk membantu penyediaan air bagi masyarakat. Alasan penggunaan uang pribadi dikarenakan iuran penggunaan air sebesar Rp 2000/m³ dinilai tidak cukup untuk melakukan pengembangan, dan masyarakat selalu “menekan” kepada Ketua BPS untuk melakukan perbaikan dan sejumlah pengembangan sarana air. Akan tetapi meskipun telah dilakukan pengembangan, pelayanan air bersih masyarakat tetap tidak merata yang pada akhirnya membuat pengelola program menggunakan sistem pembagian jadwal untuk kelancaran pasokan air kepada masyarakat.

d. Desa Kenteng

Unit Kerja Teknis Sarana Air PAMSIMAS Desa Pakis memiliki masalah besar dalam pengelolaannya di Tahun 2012, yakni hanya mampu melayani untuk masyarakat Dusun Ngrau Selatan, bahkan pelayanannya hanya mencakup dua hingga empat RT di Dusun Ngrau Selatan. Padahal jangkauan sebelumnya mencapai masyarakat di Dusun Ngrau Selatan dan Prayungan. Permasalahannya bermula ketika pengelola melakukan sejumlah pengembangan sarana di Dusun Ngrau Selatan namun tidak diikuti pengembangan sejumlah sumur yang memadai untuk

menutup lonjakan pengguna baru sarana PAMSIMAS. Bahkan menurut masyarakat Dusun Prayungan, penambahan jumlah pelanggan baru Dusun Ngrau Selatan dilakukan tanpa melalui musyawarah dari masyarakat Dusun Prayungan yang seharusnya menjadi prioritas pengembangan sarana air dan kondisi saat ini masyarakat di Dusun Prayungan tidak terjadi pengembangan sarana air. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan perasaan tidak puas dari masyarakat Dusun Prayungan, yang pada akhirnya sebagian masyarakat beralih untuk menggunakan sarana air milik Bapak Mujiyono yang dikelola serupa dengan PAMSIMAS. Meskipun pengelolaan sarana air PAMSIMAS terdapat masalah, pada Tahun 2012 Desa Pakis mendapatkan HID dengan pelaksanaan untuk pengembangan di Dusun Prayungan, meski tidak sedikit masyarakat dan pemerintah desa yang *pesimis* terhadap pelaksanaan HID tersebut, karena Dusun Prayungan dikenal dusun yang sulit air, dan dikhawatirkan menimbulkan pengelolaan yang tidak maksimal untuk penyediaan air.

Kelembagaan dari Desa Ngrandah, Kenteng, dan Desa Pakis tetap berusaha mengelola air dengan maksimal meskipun dari beberapa desa seperti Desa Pakis yang ketua BPS (Unit Kerja Teknis Air Minum) mengundurkan diri karena tidak bisa melaksanakan pengelolaan program.

Sedangkan dari segi sanitasi, pembangunan sarana sanitasi dan kesehatan telah dilaksanakan di sekolah tingkat pertama (SD) sebagai sasaran peningkatan sarana sanitasi dan kesehatan. Disisi lain, pembangunan sanitasi dan kesehatan kepada masyarakat lebih di tekankan pada aspek pembangunan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peningkatan sarana akses sanitasi yang sehat dan kesadaran akan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Akan tetapi, pada pengelolaan sanitasi yang di fokuskan untuk pemantauan perkembangan dan tingkat perkembangan sanitasi masyarakat dan sekolah, belum sepenuhnya dilakukan oleh Kader Sanitasi yang bertugas sebagai kelembagaan swadaya bidang sanitasi PAMSIMAS. Dari keempat desa tersebut hanya Kader Sanitasi Desa Kenteng yang memiliki kegiatan rutin untuk pemantauan tersebut, yakni setiap bulan pada tanggal 20. Menurut penutran Bidan Desa, bahwa dampak dari pemantauan tersebut menghasilkan ketetapan bahwa Dusun Ngacir merupakan dusun yang bebas dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan) atau ODF (*Open Defecation Free*). Sedangkan Desa Jetaksari, Ngrandah dan Desa Pakis memiliki masalah pada pelaksanaan pemantauan tersebut yakni koordinasi dengan anggota Kader Sanitasi untuk membantu Bidan Desa dalam pemantauan sanitasi dan PHBS di masyarakat dan sekolah. Meskipun Dusun Prayungan dan Dusun Ngarau Desa Pakis telah ditetapkan sebagai dusun yang bebas BABS/ODF, namun menurut Bidan Desa bahwa pencapaian ODF merupakan syarat untuk mendapatkan HID, setelah mendapatkan HID tidak ada kegiatan maupun bantuan dari pemerintah desa mengenai pemantauan lanjutan tersebut.

Pencapaian Komponen II: Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Pelayanan Sanitasi

Dikarenakan masalah pada pencapaian komponen I, berakibat pada pencapaian komponen II dan III. Dari segi pencapaian komponen II, Komponen ini untuk melihat capaian/keberhasilan pelaksanaan kegiatan sanitasi PAMSIMAS yang dilakukan oleh Kader Sanitasi/Unit Kerja Kesehatan dari desa/kelurahan yang mendapatkan Program PAMSIMAS. Ukuran keberhasilan pencapaian komponen ini meliputi:

- 1) 80% masyarakat sasaran berhenti buang air besar sembarangan;
- 2) 80% masyarakat sasaran menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun pada waktu-waktu kritis;
- 3) 95% sekolah sasaran mempunyai sarana sanitasi yang layak dan program PHBS.

Dari pencapaian oleh Desa Jetaksari, Kenteng, Ngrandah dan Desa Pakis. Secara garis besar, belum mencapai ketiga ukuran keberhasilan tersebut, karena belum diketahui apakah masyarakat sasaran berhenti BABS dan menerapkan perilaku cuci tangan menggunakan sabun pada waktu tertentu. Meskipun Dusun Ngacir yang ada di Desa Kenteng dan Dusun Prayungan dan Ngaru, Desa Pakis mendapatkan predikat sebagai Desa yang telah ODF/Bebas BABS. Namun pencapaian predikat bebas BABS itu perlu dipertanyakan, “apakah memang masyarakatnya telah menerapkan praktek BABS atau hanya sekedar syarat untuk mendapatkan HID (Hibah Insentif Desa) PAMSIMAS”, yakni sebesar ± Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

Selain itu, pemantau terhadap kondisi sanitasi dan PHBS yang ada di sekolah tingkat SD (Sekolah Dasar) atau MI (Madrasah Ibtidaniyah), belum dilakukan oleh Kader Sanitasi desa-desa penerima Program PAMSIMAS tersebut. Meskipun telah dibantu sejumlah pengadaan bantuan fisik sanitasi, seperti pembangunan kamar mandi, dan peralatan kebersihan maupun papan monitoring PHBS dan kesehatan siswa-siswi. Sehingga, belum dipastikan apakah memang masyarakat memiliki kesadaran sanitasi dan PHBS maupun belum dilakukannya analisis mengenai apakah pemahaman masyarakat mengenai kebersihan (higienis), dan sanitasi telah sesuai dengan definisi sanitasi dan PHBS yang ada di dalam Program PAMSIMAS. Hal tersebut, belum dilakukan oleh Kader Sanitasi maupun TFM (konsultan kabupaten), karena Program PAMSIMAS memerlukan keberlanjutan dan bukan sekedar pelaksanaan semata.

Pencapaian Komponen III: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi

Keberhasilan komponen ini diukur dari beberapa capaian seperti :

- 1) Sarana air minum yang berfungsi, dimanfaatkan serta memenuhi tingkat kepuasan mayoritas masyarakat sasaran;
- 2) Sarana air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat.

Sedangkan fungsi dan kondisi sarana air PAMSIMAS untuk Desa Ngrandah, Kenteng dan Desa Pakis telah berfungsi dengan baik yakni dari tandon hingga jalur perpipaan masih berfungsi dengan baik untuk pelayanan kebutuhan air masyarakat, namun untuk Hidran/Keran Umum tidak digunakan karena penggunaan dari masyarakat tidak terkontrol dan tidak menghasilkan keuntungan pengelolaan air.

Dari segi pembiayaan, berasal dari penggunaan air oleh masyarakat yang besaran nominalnya ditentukan sesuai kesepakatan masyarakat. Meskipun biaya dari masyarakat, belum sepenuhnya membantu untuk pengembangan akses sarana air, karena biaya yang diperoleh dari masyarakat hanya cukup untuk operasional dan perawatan. Ketika dilakukan untuk pengembangan, pengelola harus melakukan penghematan dan tidak jarang menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan biaya dalam pengembangan sarana air PAMSIMAS untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi, fungsi sarana air PAMSIMAS hanya digunakan ketika musim kemarau, sedangkan di musim penghujan masyarakat lebih memilih sarana air yang dimiliki masyarakat, seperti sumur. Hal ini dikarenakan ketika musim penghujan sarana air yang dimiliki masyarakat telah terisi air, dan penggunaan sarana air pribadi dimaksudkan untuk efisiensi pengeluaran biaya masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Sehingga secara efektivitas, sarana air

PAMSIMAS hanya digunakan ketika musim kemarau, dan itupun tidak maksimal dalam pelayanan air masyarakat karena debit air yang menurun akibat kemarau.

Disisi lain, tingkat kepuasan masyarakat Desa Kenteng, Ngrandah dan Desa Pakis mendapat penilaian positif dari masyarakat, artinya masyarakat sangat terbantu dengan adanya sarana air PAMSIMAS di dusun mereka. Namun mereka hanya mengeluhkan, jangkauan pelayanan yang terus menerus menurun akibat musim kemarau maupun dikarenakan penambahan jumlah pelanggan baru tanpa di imbangi dengan penambahan jumlah sumur air PAMSIMAS secara signifikan.

Adapula tingkat kepuasan masyarakat yang menurun terhadap pelayanan air PAMSIMAS, seperti timbulnya perasaan kecewa pada sebagian masyarakat di Dusun Wuniareng terhadap pelaksanaan dan pengelolaan sarana air Program PAMSIMAS, karena tidak manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat. Sedangkan pelayanan air di Desa Pakis yakni kepuasan pelayanan justru terjadi di Dusun Ngrau Selatan dan sebaliknya justru terjadi pada masyarakat yang ada di Dusun Prayungan. Alasannya, masyarakat Dusun Prayungan merasa “dikecewakan” oleh Ketua BPS yang lama (Bapak Kusnandar), karena pengembangan sarana yang seharusnya untuk masyarakat Dusun Prayungan justru dilakukan di Dusun Ngrau Selatan. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan tersebut, dan menimbulkan tindakan masyarakat yang beralih menjadi pelanggan air dari sumur swasta milik Bapak Mujiyono.

Komponen Akhir : Pencapaian Tujuan Akhir Program PAMSIMAS

Tujuan akhir Program PAMSIMAS menekankan pada pencapaian dampak dan perubahan yang diharapkan didalam Program PAMSIMAS, yakni :

- Peningkatan perilaku higienis di masyarakat; meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;
- Meningkatkan kapasitas lokal (baik pemerintah daerah maupun masyarakat) untuk memfokuskan dan menyebarluaskan pelaksanaan program air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat; dan
- Meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan jangka panjang pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

Dari keadaan pengelolaan Program PAMSIMAS dari Desa Jetaksari, Kenteng, Ngrandah dan Desa Pakis, menunjukan upaya yang sangat lama (memakan waktu) untuk mewujudkan “dampak dan perubahan masyarakat” akan akses air dan peningkatan kesadaran sanitasi. Hal ini dikarenakan sejumlah permasalahan dari sarana air, dan upaya peningkatan kesadaran sanitasi masyarakat.

Sebenarnya untuk melihat pencapaian tujuan akhir tersebut, pihak pengelola Program PAMSIMAS tingkat desa telah dibekali kemampuan untuk membuat analisa dan laporan mengenai perkembangan dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi yang dibangun. Kemampuan tersebut berasal dari pelatihan yang diberikan oleh TFM (Tim Fasilitator Masyarakat) ketika proses pembangunan Program PAMSIMAS, materi pelatihan tersebut terdapat pada dokumen perencanaan RKM Tahap I dan II. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan untuk monitoring/pemantauan dan evaluasi capaian atau hasil pengelolaan program.

Laporan yang berbentuk monitoring ataupun evaluasi digunakan untuk analisis “sebab-akibat” dan untuk pengambilan keputusan ketika didalam pengelolaan program terdapat masalah. Kemudian dari laporan monitoring maupun evaluasi tersebut dilaporkan perkembangannya kepada Konsultan PAMSIMAS Tingkat Kabupaten (DMAC), sebagai proses koordinasi dan saling memantau pada pelaksanaan pengelolaan Program PAMSIMAS, supaya tetap memiliki keberlanjutan. Selain itu, ketika melakukan monitoring dan evaluasi, pihak pengelola desa/kelurahan mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari TFM untuk pembuatan pelaporan tersebut.

Akan tetapi, laporan pemantauan dan evaluasi dibuat oleh Badan Pengelola dari keempat desa tersebut hanya melalui pesan singkat (SMS) yang diberikan kepada TFM maupun Konsultan PAMSIMAS (DMAC), tanpa menggunakan laporan resmi seperti yang telah diberikan dalam pelatihan selama proses pembangunan. Hal ini tentu menyulitkan upaya untuk analisis, karena yang dilaporkan hanya kondisi fisik seperti :

- Seberapa jauh akses yang telah dibangun dan dikembangkan;
- Bagaimana kondisi sarana saat ini;
- Apakah telah melakukan pemantauan sanitasi dan kegiatan kesehatan kepada masyarakat yang terkait dengan PAMSIMAS;

Konsep Monev (Monitoring-Evaluasi) yang dilakukan BPS Air dan Sanitasi maupun TFM, tidak menjelaskan hubungan “sebab-akibat” dan analisis masalah seperti:

- Apakah sarana air yang dibangun telah memberikan manfaat bagi masyarakat;
- Apakah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan sanitasi dan PHBS, berasal dari materi yang ada di dalam Program PAMSIMAS?;
- Apakah pemahaman masyarakat akan sanitasi dan PHBS telah sesuai dengan materi/konsep sanitasi dan PHBS PAMSIMAS?;
- Bagaimana keterlibatan masyarakat didalam pengelolaan Program PAMSIMAS?;

Hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh BPS Air dan Sanitasi, jika melihat keadaan yang diperoleh ketika berada di lokasi penelitian. Bahkan, para BPS hanya membuat laporan secara lengkap dan detail hanya pada saat proses perencanaan dan pembangunan, yakni pada proses pembuatan dokumen RKM I, IMAS, dan RKM II serta laporan awal tahun pengelolaan dan tanggungjawab penggunaan operasional.

Jika Monev melalui pesan singkat/SMS, merupakan tindakan yang kurang efektif, karena tidak bisa mengetahui perkembangan dan pengelolaan secara detail, serta tidak mengetahui permasalahan di dalam pengelolaan Program PAMSIMAS.

Disisi lain, hal ini dinilai kurang efisien, karena ketika proses perencanaan pembangunan program Badan Pengelola Desa mendapat pelatihan administrasi pelaporan dan Monev. Ketika pemantauan keberlanjutan dan evaluasi capaian pelaksanaan melalui pesan singkat, maka pelatihan yang menghabiskan dana ± Rp 5.000.000 akan tidak efisien (baca: sia-sia). Padahal pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan dari Program PAMSIMAS merupakan komponen pendukung untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan akhir program, yakni dampak dan perubahan setelah ada Program PAMSIMAS

E. Kesimpulan

Permasalahan dari adanya variasi capaian program, yakni berhasil dan tidaknya tujuan Program PAMSIMAS dapat terlaksana oleh desa-desa penerima PAMSIMAS didalam menyediakan air bersih dan peningkatan sanitasi masyarakat. Variasi capaian tersebut dikarenakan proses pelaksanaan dari komponen-komponen Program PAMSIMAS, dimana terdapat tiga komponen yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program PAMSIMAS. Salah satu komponen penting yang menjadi kunci utama serta yang menjadi kendala desa penerima Program PAMSIMAS didalam pencapaian tujuan program adalah pada komponen “Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal”. Komponen utama yang tertuang didalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang membahas perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan Program PAMSIMAS. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Jetaksari, Kenteng, Ngrandah dan Desa Pakis sebagai desa penerima Program PAMSIMAS.

Dari segi perencanaan program yang dilakukan keempat desa tersebut, keterlibatan masyarakat didalam perencanaan program hanya dari perwakilan masyarakat dan pemerintah desa. Namun, hasil perencanaan itu tidak disampaikan kepada masyarakat luas oleh perwakilan tersebut, apakah melalui sarana informasi seperti rapat, dsb. Sehingga tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana perencanaan Program PAMSIMAS di desa mereka. Bahkan yang diketahui masyarakat didalam perencanaan hanya untuk kontribusi biaya dan tenaga ketika proses pelaksanaan pembangunan Program PAMSIMAS. Tahap perencanaan juga membahas bagaimana kontribusi masyarakat didalam program, yakni kontribusi biaya (*in-cash*) dan tenaga (*in-kind*). Dari fakta yang ditemukan, hanya Desa Jetaksari yang masyarakatnya tidak mau berkontribusi biaya, dan lebih memilih terlibat didalam pembangunan sarana fisik (*in-kind*), karena ketiadaan dana swadaya masyarakat terhadap program pemerintah desa mengambil keputusan untuk menggunakan uang pribadi untuk swadaya Program PAMSIMAS. Sedangkan kondisi di desa lain, baik kontribusi biaya dan tenaga diberikan masyarakat didalam perencanaan hingga pembangunan program.

Disisi lain, terdapat kesamaan kondisi pelaksanaan dan pengelolaan Program PAMSIMAS dari keempat desa tersebut, yakni penggunaan air oleh masyarakat yang hanya ketika musim kemarau, sedangkan ketika musim penghujan sedikit sekali dan bahkan tidak ada masyarakat yang menggunakan air dari sarana PAMSIMAS karena kebutuhan air masyarakatnya telah tercukupi dari sarana air (sumur) yang dimiliki masyarakat. Hal ini tentu tidak efektif dalam hal penggunaan Program PAMSIMAS dari segi sarana air bersih yang telah di rencanakan dan di bangun, karena Program PAMSIMAS memerlukan keberlanjutan didalam pengelolaannya. Kesamaan yang lain adalah kondisi sarana sanitasi yang masih layak dan berfungsi dengan baik, namun yang membedakannya adalah penggunaan sarana sanitasi dari keempat desa tersebut untuk kegiatan pemantauan sanitasi dan PHBS masyarakat dan sekolah serta pengelolaan sarana air.

Adapun perbedaan yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Desa Jetaksari, kondisi sarana air PAMSIMAS tidak berfungsi untuk melayani masyarakat, dikarenakan kualitas air yang tidak layak konsumsi akibat kesalahan didalam pembangunan yang tidak mengedepankan mutu dan kualitas air melalui uji kesehatan. Sehingga menyebabkan sarana air yang telah dibangun tidak memiliki manfaat sejak pertama kali diresmikan. Sedangkan pada kondisi kegiatan sanitasi, Kader Kesehatan yang telah dibentuk tidak menjalankan kegiatan pemantauan mengenai perkembangan sanitasi dan PHBS masyarakat dan sekolah, hal ini dikarenakan masalah pada koordinasi dan pemahaman mengenai konsep “relawan” sanitasi. Pemikiran Kader Sanitasi bahwa jika tidak ada dana operasional, maka

kegiatan pemantauan sanitasi terkendala. Sehingga kondisi sarana air dan sanitasi melalui

2. Desa Kenteng, kondisi sarana air PAMSIMAS telah berfungsi dan berhasil menyediakan air bagi masyarakat meskipun penggunaannya hanya ketika musim kemarau, dan itupun hanya dapat menyediakan air bagi masyarakat selama satu hingga dua bulan di musim kemarau. Hal ini dikarenakan selain masalah pada sumber air PAMSIMAS yang ikut mengering serta penambahan sumur yang masih belum mencukupi untuk bertahan di musim kemarau, juga diakibatkan adanya sejumlah sarana air yang berkurang seperti pipa peralon dan pompa air, karena kurangnya kontrol pengelola sehingga sarana tersebut hilang. Sedangkan kegiatan untuk pemantauan perkembangan sanitasi dan PHBS masyarakat telah dilakukan setiap bulannya di tanggal 20, bertepatan dengan kegiatan Posyandu dan kegiatan penyuluhan kesehatan lainnya. Meskipun fokus pemantauan baru dilakukan untuk masyarakat, sedangkan sekolah belum dilaksanakan. Desa Kenteng khususnya Dusun Ngacir telah dinyatakan sebagai dusun yang bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan) atau ODF (*Open Defecation Free*), dan dari keberhasilan pengelolaan air dan sanitasi pada tahun 2011 Desa Kenteng mendapatkan HID (Hibah Insentif Desa) untuk pengembangan Program PAMSIMAS.
3. Desa Ngrandah, penyediaan air bagi masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan sejumlah sarana berfungsi dengan baik. Namun didalam penyediaan air masyarakat, terhambat pada masalah jangkauan pelayanan air karena berkurangnya debit air dari sumur PAMSIMAS ketika musim kemarau. Selain itu, juga diakibatkan adanya tindakan masyarakat yang melakukan praktek kecurangan seperti melubangi pipa air (pencurian) dan mengalirkannya langsung ke sumur bukan ke bak mandi atau penampungan air, sehingga membuat jangkau pelayanan terganggu dan merugikan bagi pengelolaan air. Sedangkan dari kegiatan pemantauan sanitasi memiliki kondisi yang kurang berhasil yakni sedikit sekali kegiatan pemantauan untuk melihat tingkat kesadaran sanitasi dan PHBS masyarakat dan sekolah, yang dikarenakan masalah koordinasi dan bantuan dari anggota Kader Sanitasi yang dibentuk.
4. Desa Pakis, penyediaan air bagi masyarakat pada awalnya berhasil dilaksanakan namun pada saat ini kondisinya kurang berhasil menyediakan air bagi masyarakat, karena selain sarana air yang tidak digunakan ketika musim penghujan, masalah lain adalah karena penambahan jumlah pelanggan baru yang tidak di imbangi dengan penambahan jumlah sumur PAMSIMAS untuk mengimbangi tingkat penggunaan air yang cukup besar, sehingga mempengaruhi kondisi debit air dari sumur yang ada. Akibat pelayanan dan distribusi air yang tidak maksimal khususnya bagi masyarakat di Dusun Prayungan, menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat terlebih penambahan jumlah pelanggan di Dusun Ngrau Selatan tidak melalui kesepakatan dan musyawarah dengan masyarakat, sehingga ada sebagian masyarakat beralih menggunakan sumur swasta milik Bapak Mujiyono dan memilih membuat sumur bor untuk penggunaan pribadi.

Sedangkan kondisi pemantauan sanitasi dan PHBS masyarakat pada awalnya berjalan, dan dikatakan berhasil karena di Tahun 2010 Dusun Prayungan dan Ngrau yang menjadi lokasi Pembangunan PAMSIMAS dinyatakan sebagai dusun yang bebas BABS/ODF. Akan tetapi pada Tahun 2012, tidak ada kegiatan monitoring yang telah dilakukan oleh Kader Sanitasi. Hal ini

dikarenakan kurangnya koordinasi dan bantuan dari anggota dan pihak pemerintah desa, bahkan menurut Badan Desa pemantauan yang pernah dilakukan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan HID di tahun 2012 ini, dimana baik aparat pemerintah desa dan anggota kader maupun BPS “semangat” dalam hal mendapatkan HID tersebut untuk pengembangan program, namun setelah dinyatakan berhasil mendapatkan HID kondisi saat ini tidak “semangat” seperti dahulu.

F. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi untuk pencapaian program secara maksimal. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait hasil penelitian yang didapatkan, adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukannya sebuah konsep inovasi untuk mengatasi adanya kesenjangan penggunaan air PAMSIMAS yang hanya digunakan ketika musim kemarau, sedangkan musim penghujan tidak banyak dan bahkan tidak ada masyarakat yang menggunakan air. Konsep inovasi yang dimaksud adalah dengan merubah pola pengelolaan air ketika musim penghujan menjadi air siap minum, seperti “Depot dan Isi Ulang Air Minum”. Sehingga tidak sekedar penyediaan air bagi masyarakat, karena ketika sumur masyarakat telah terisi air maka secara mandiri masyarakat dapat menggunakan sumur tersebut untuk menyediakan air bagi kebutuhan mereka, tanpa harus menggunakan air dari PAMSIMAS.
- b. Terkait konsep inovasi tersebut, perlu didapatkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakannya. Sehingga pengelola program (BPS) perlu mengajukan bantuan pendanaan kepada pemerintah desa melalui anggaran/kas yang dimiliki pemerintah maupun melalui Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan sarana air minum PAMSIMAS didalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Keterlibatan pemerintah desa sangat diperlukan karena selain pembangunannya berada di desa mereka, juga sarana air PAMSIMAS dapat dijadikan aset desa sebagai sumber pendapatan.
- c. Dari segi sarana air minum, Desa Jetaksari perlu dilakukan pembuatan sumur baru untuk mengganti sumur yang lama yang memiliki rasa asin dan berwarna (tidak layak) bagi masyarakat. Sedangkan Desa Kenteng, Ngrandah dan Pakis perlu penambahan jumlah sumur baru untuk melayani kebutuhan air masyarakatnya secara maksimal, dalam artian mampu menjangkau hingga seluruh pelanggan air PAMSIMAS. Jika terkenadala pada masalah biaya untuk pembangunan dan penambahan sumur baru, maka solusinya adalah dengan mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Desa maupun proposal untuk RPJMDes dalam hal peningkatan sarana air PAMSIMAS dari masing-masing desa tersebut.
- d. Dari segi kegiatan sanitasi, sederhananya masalah yang ada hanya terdapat pada kemauan Kader Sanitasi untuk kembali melakukan pemantauan tentang kesadaran sanitasi masyarakat dan PHBS. Jika kesulitan didalam pembuatan jadwal baru untuk pelaksanaan tersebut, dapat diambil solusi dengan melakukan kegiatan pemantauan sekaligus melakukan kegiatan kesehatan lain secara bersamaan seperti kegiatan Posyandu, seperti yang dilakukan oleh Kader Sanitasi PAMSIMAS Desa Kenteng.
- e. Didalam pemantauan dan evaluasi (Monev), perlu dilaksanakan sesuai prosedur Monev seperti yang ada didalam pelatihan administrasi dan pelaporan pengelolaan ketika proses pembangunan dahulu, karena jika melakukan Monev pengelolaan Program PAMSIMAS sesuai prosedur maka akan diketahui secara jelas mengenai permasalahan didalam

pengelolaan program. Hal ini dikarenakan Monev memuat penilaian hubungan “sebab-akibat” (korelasi) didalam pengelolaan, sehingga dengan menggunakan prosedur Monev dapat diambil keputusan dan solusi sesuai analisis didalam Monev. Hal tentu tidak akan terlaksana apabila Monev hanya melalui “pesan singkat” atau SMS tanpa menggunakan dokumen analisa Monev, baik yang dilakukan oleh BPS dan Konsultan PAMSIMAS.

G. Daftar Pustaka

- Afifudin, H. & Saebani, Beni Achmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budi, Winarno. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media pressindo.
- Dunn, William. 2003. *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition*, Alih Bahasa 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Ed. Ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Kencono, Dewi Sekar. 2010. *Evaluasi Program Sragen Cyber Regency*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi, Advokasi, Teori dan Praktek*. Surabaya: PNM.
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik untuk negara-negara berkembang : Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo.
- Putra, Fadilah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik; Perubahan & Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran: Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Centre For Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada.
- Subyanto, Arif & Suwanto, FX. 2007. *Metodologi dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV. Arva Offset.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Ed. 2, Cet. 6. Jakarta: Bumi Aksara.